

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum dalam penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur”, terdiri atas penjelasan gambaran umum Kota Semarang yang terbagi atas penggambaran kondisi geografi dan kondisi demografi, gambaran umum Kecamatan Gajahmungkur, gambaran umum dari Kebijakan Kampung Tematik di Kota Semarang.

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota administratif yang berstatus sebagai kota metropolitan yang merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Dalam buku Sejarah Kota Semarang digambarkan bahwa Kota Semarang dahulu ibukota dari Kabupaten Semarang dalam satuan Kerajaan Pajang dan Demak. Dahulu, Semarang hanya merupakan sebuah desa dengan kawasan lahan yang memiliki kondisi basah pe-rawaan dan ditumbuhi pohon asam yang jarang, oleh karenanya Sunan Pandanaran I menyebut kawan tersebut dengan Semarang dari kata Bahasa Jawa “*Asam kang arang-arang*”, di bawah kepemimpinan Sunan Pandanaran I, Desa Semarang kemudian tumbuh pesat dari segi ekonomi dan sosial.

Kemudian, sepeninggal Sunan Pandanaran I yang dilanjutkan Sunan Pandanaran II, Desa Semarang atas kebijakan dari Kesultanan Pajang maka ditetapkanlah Kabupaten Semarang dengan Bupati Pertama Sunan Pandanaran II pada 12 Rabiul Awal 954H / 2 Mei 1547 Sejak saat itu juga ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Pada zaman kolonialisme Belanda dan VOC, Semarang tumbuh pesat dengan kondisi perdagangannya. Kala itu, Kota Semarang terkenal dengan Pelabuhan dagang yang menyambungkan antara Surabaya, Kerajaan Demak, dan Batavia. Hingga sampai sekarang, julukan *Harbour/Port Van Java* menjadi julukan bagi Kota Semarang.

Sebuah Sejarah singkat yang mengantar Kota Semarang dari berdirinya memberikan pengaruh bagi kehidupan di Kota Semarang saat ini, beberapa momentum yang terjadi di Kota Semarang tidak lepas dengan kondisi alam (geografi) dan kondisi penduduknya (demografi) yang mempengaruhi Kota Semarang dalam penelitian ini.

2.1.1 Kondisi Geografi

Kota Semarang dalam bujur peta terletak antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 35' – 1100 50' Bujur Timur. Kota yang dikenal sebagai Ibukota dari Jawa Tengah berbatasan langsung di sebelah utara dengan Laut Jawa, di sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal. Secara “Tren” wilayah Kota Semarang menjadi kondisi keadaan yang unik karena memiliki laut, pantai, barisan perbukitan, dan dataran tinggi dalam satu wilayah kota.

Wilayah pesisir Kota Semarang memiliki kondisi topografi bervariasi dengan elevasi yang berada pada ketinggian antara 0,75 meter sampai sekitar 348 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dan kawasan pesisir mendominasi bagian utara Kota Semarang meliputi kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk ke dalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal - Kab. Demak - Kab. Semarang - Kota Semarang - Kota Salatiga - Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Selanjutnya secara administratif kewilayahan pembagian 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang, terbagi atas Tugu, Semarang Utara, Genuk, Semarang Timur, Pedurungan, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Barat, Ngaliyan, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Banyumanik, Mijen, Gayamsari, dan Gajahmungkur. Selanjutnya, dari 16 Kecamatan yang ada, terbagi lagi dalam 177 Kelurahan yang berada di wilayah Kota Semarang.

Lebih dalam lagi, dari kondisi geografi yang ada di Kota Semarang akan membentuk dan mempengaruhi kondisi penduduk (demografi) yang ada di Kota Semarang. Kondisi demografi akan dijelaskan pada sub-subbab selanjutnya.

2.1.2 Kondisi Demografi

Kondisi Demografi Kota Semarang tidak jauh dari kondisi geografi yang ada di Kota Semarang. Kondisi Geografi yang membentang dari pesisir hingga dataran tinggi membentuk pola-pola kehidupan yang ada bagi masyarakat Kota

Semarang dari segi sosial dan ekonomi. Kondisi demografi Kota Semarang merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk merupakan salah satu sumber daya yang partisipasinya sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi demografi di Kota Semarang umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya.

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, kondisi demografi Kota Semarang merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.685.909 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan mencapai 4.511 jiwa/km². Apabila dirinci maka terdapat penambahan sebanyak 11.551 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di 16 kecamatan.

Tabel 2.1 Data Demografi Kota Semarang 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Kepadatan Penduduk Tahun 2020 (Jiwa/Km ²)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Semarang Tengah	62,639	61,358	61,073	62,854	61,011	9.937
2	Semarang Barat	160,004	160,483	159,018	157,348	157,434	7.242
3	Semarang Utara	125,956	125,133	125,795	130,434	124,304	11.331
4	Semarang Timur	75,473	73,993	73,491	72,433	72,263	9.385
5	Gayamsari	74,158	73,582	73,954	73,716	73,554	11.902
6	Gajah Mungkur	60,080	60,509	60,146	59,591	59,156	6.522
7	Genuk	108,533	109,578	114,252	115,058	119,716	4.371
8	Pedurungan	187,938	191,039	192,798	192,424	195,589	9.440
9	Candisari	81,367	81,237	80,490	79,385	79,567	12.166
10	Banyumanik	136,866	139,826	139,927	140,419	142,303	5.539
11	Gunungpati	89,809	91,279	93,866	94,347	96,277	1.779
12	Tembalang	171,993	175,845	178,830	180,500	184,807	4.181
13	Tugu	32,873	32,839	33,466	33,308	34,034	1.071
14	Ngaliyan	136,791	137,249	138,618	139,338	141,094	3.714
15	Mijen	68,042	70,413	73,479	74,696	76,793	1.334
16	Semarang Selatan	75,757	74,189	69,375	68,507	68,007	11.468
Jml Penduduk		1.648.279	1.658.552	1.668.578	1.674.358	1.685.909	
Sex Ratio (%)		(818.061/830.218) x 100% = 98,62%	(823.173/835.379) x 100% = 98,54%	(825.992/841.139) x 100% = 98,02%	(828.848/845.510) x 100% = 98,03%	(835.138/850.771) x 100% = 98,16%	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,14 %	0,588%	0,582%	0,582%	0,582%	
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		4.410	4.438	4465	4.480	4.511	

Sumber: Disdukcapil Kota Semarang

Kecamatan Pedurungan dengan luas 20,72 km² merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Semarang yaitu sebesar 195.589 orang, namun di sisi lain justru kepadatan penduduknya hanya ketujuh tertinggi. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 12.166 jiwa/km² adalah Kecamatan Candisari dengan luas 6,54 km² dan ditempati sebanyak 79.567 penduduk. Secara umum, wilayah kecamatan yang terletak di pusat kota atau wilayah Semarang bagian bawah memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi yang dipengaruhi oleh keberadaan pusat-pusat kegiatan baik pemerintahan maupun perdagangan yang lebih banyak terkonsentrasi di pusat kota.

Namun di sisi lain, di Kecamatan Banyumanik (5.539 jiwa/km²), Gunungpati (1.779 jiwa/km²) dan Mijen (1.334 jiwa/km²) juga berpotensi untuk terus meningkat dari sisi jumlah penduduk dan kepadatan dikarenakan adanya potensi pengembangan wilayah yang dipicu oleh pengembangan kawasan perumahan dan kawasan pendidikan. Persebaran penduduk dan kepadatan di Kota Semarang cenderung belum merata dan masih terpusat di Semarang Bawah yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan.

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kota Semarang dapat dilihat melalui kondisi PRDB dan kondisi kemiskinan di Kota Semarang tahun 2021-2023. Gambaran Ekonomi Kota Semarang Tahun 2023 melalui PRDB (penyediaan tenaga kerja) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,79 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 yang sebesar 5,73 persen. Hal ini sesuai dengan tabel berikut;

Tabel 2.2 Sektor PDRB Lapangan Usaha Kota Semarang Tahun 2021- 2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Indeks Implisit (Persen)		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.51	3.86	4.67
B. Pertambangan dan Penggalian	0.53	4.20	2.97
C. Industri Pengolahan	3.39	5.52	4.77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	0.56	1.52
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.36	0.01	0.01
F. Konstruksi	5.99	6.83	4.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.77	4.42	3.51
H. Transportasi dan Pergudangan	0.13	10.97	9.51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.04	2.27	1.24
J. Informasi dan Komunikasi	0.01	0.01	0.17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.93	8.84	2.02
L. Real Estate	1.33	1.89	1.04
M, N. Jasa Perusahaan	1.08	4.91	3.56
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.32	2.12	2.09
P. Jasa Pendidikan	1.53	0.14	0.21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.23	1.08	1.45
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.84	4.18	3.05
PDRB	3.22	4.97	3.48

Sumber: BPS Kota Semarang (2023)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Kota Semarang paling tinggi di tahun 2021 dan 2022 pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan persentase 4,93 dan 8,84. Sedangkan pada tahun 2023 berada pada Transportasi dan Pergudangan dengan persentase 9,51. Sektor PDRB Lapangan Usaha Kota Semarang paling rendah di tahun 2021 dan 2022 berada pada sektor Informasi dan Komunikasi dengan

persentase 0,01. Sedangkan pada tahun 2023 berada pada Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan persentase 0.01.

Kondisi ekonomi Kota Semarang yang berhubungan dengan kondisi sosial juga dapat dilihat melalui gambaran penduduk miskin di Kota Semarang. Penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2023 berada di 79,87 ribu jiwa yang dalam persentase 4,25 persen dari total penduduk di Kota Semarang. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.3 Kemiskinan dan Ketimpangan Kota Semarang dari Tahun 2021-2023

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan		
	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Rp522.691	Rp543.929	Rp589.598
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	79.58	84.45	79.87
Persentase	4.34	4.56	4.25
Index Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.68	0.67	0.56
Index Keparahan Kemiskinan (P2)	0.16	0.14	0.11

Sumber: semarangkota.bps.go.id/indicator/23/98/1/indikator-kemiskinan.html

Kondisi kemiskinan Kota Semarang mengalami hal yang fluktuatif pada tahun 2021-2023. Kondisi penduduk miskin pada tahun 2021 berada pada jumlah 79.58 ribu jiwa dengan rata-rata pendapatan terendah Rp522.691. Kondisi kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2022 mengalami kenaikan pada 84.45 ribu jiwa dengan rerata pendapatan terendah Rp543.929. Sedangkan pada tahun 2023, kondisi kemiskinan Kota Semarang berada dengan jumlah 79,87 ribu jiwa dengan rerata pendapatan terendah Rp589.598.

2.2 Kecamatan Gajahmungkur

Kecamatan Gajahmungkur merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kecamatan memiliki luas wilayah 764.97 Ha. Mengutip dari

laman website Kecamatan Gajahmungkur, dahulu Kecamatan Gajahmungkur merupakan bagian dari Kecamatan Semarang Selatan. Kecamatan Gajahmungkur terdiri dan membawahi delapan (8) wilayah administrasi kelurahan, di antaranya; Sampangan, Bendan Duwur, Karangrejo, Gajahmungkur, Bendan Ngisor, Petompon, Bendungan, dan Lempongsari.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang

Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. SAMPANGAN	0,95	10,14
2. BENDAN DUWUR	1,04	11,18
3. KARANG REJO	1,26	13,45
4. GAJAHMUNGKUR	3,14	33,56
5. BENDAN NGISOR	0,83	8,90
6. PETOMPON	0,87	9,28
7. BENDUNGAN	0,45	4,77
8. LEMPONGSARI	0,81	8,72
Gajah Mungkur	9,34	100,00

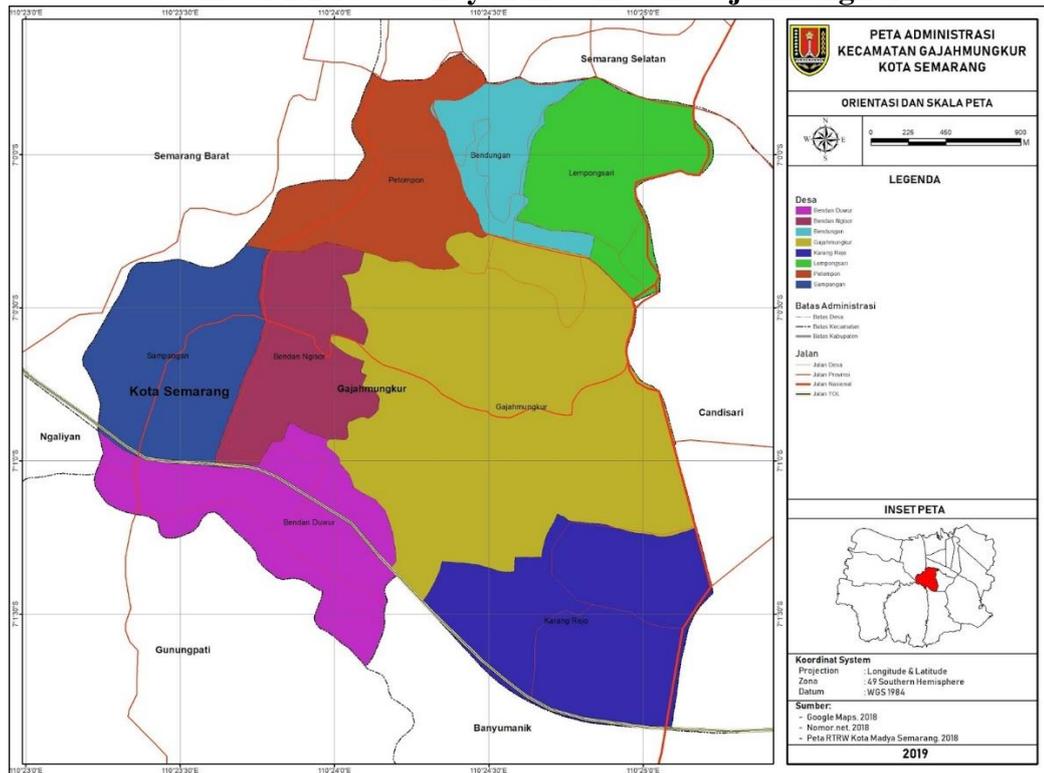
Sumber: Permendagri dalam BPS Kota Semarang 2021

Kecamatan Gajahmungkur berbatasan dengan kecamatan Semarang Selatan di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Candisari, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Gunungpati dan Banyumanik, dan yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan dan Semarang Barat. Pusat pemerintahan atau yang dikenal dengan kantor Kecamatan Gajahmungkur terletak di Jl. Letjen S. Parman, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Kondisi Geografi Kecamatan Gajahmungkur terletak pada lereng perbukitan, terdapat kawasan perumahan dengan kelas elite di Kelurahan Gajahmungkur, dan kawasan pemukiman menengah ke bawah yang tersebar di

berbagai kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur. Kecamatan Gajahmungkur terkenal sebagai kediaman dinas milik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Gajahmungkur



Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Semarang

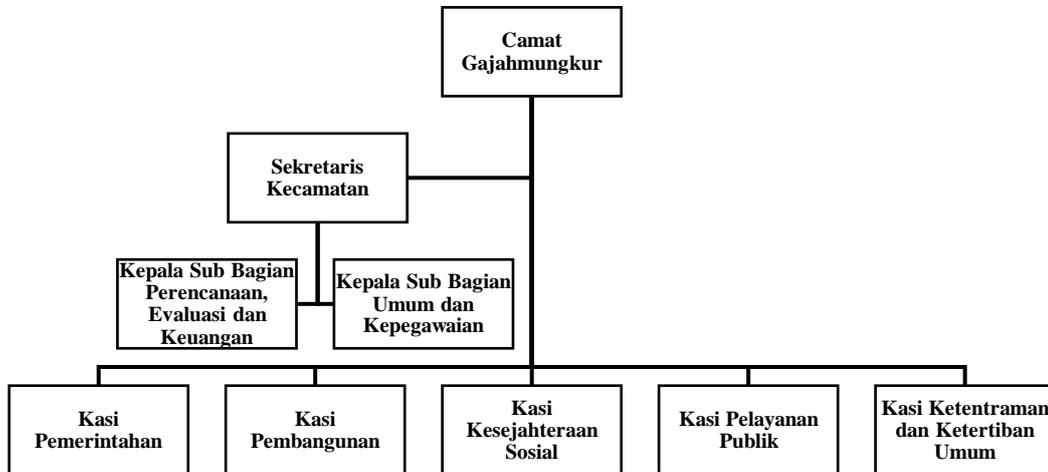
Tidak terlepas dari pusat kegiatan pemerintahan, mengutip Rencana Strategis Kecamatan Gajahmungkur 2021-2026 dan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tugas pokok dari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- a. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Gajahmungkur mempunyai fungsi di antaranya;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; penyelenggaraan kerja sama; penyelenggaraan sekretariat; penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- f. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gajahmungkur telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi yang terdiri atas Camat yang dibantu ke tugasannya oleh Sekretaris Kecamatan; Sekretaris Kecamatan kemudian dibantu oleh beberapa divisi untuk dengan jabatan Kepala Sub Bagian untuk mengelola beberapa persoalan administrasi internal, terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dalam urusannya mengelola serta melakukan kegiatan pemerintahan, Camat Gajahmungkur juga dibantu oleh beberapa kasi/ kadiv yang setara, di antaranya; Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pelayanan Publik, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bagan 2.5 Struktur Jabatan Kecamatan Gajahmungkur



Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Gajahmungkur 2021-2026

2.3 Kampung Tematik

Program Kampung Tematik merupakan inovasi baru Pemerintahan Kota Semarang. Kampung Tematik menjadi salah satu unggulan Mantan Walikota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi sebagai alternatif baru destinasi wisata dengan anggaran yang cukup dijangkau dan memberikan dampak untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup khususnya pada kawasan masyarakat miskin.

Selanjutnya, Program Kampung Tematik di Kota Semarang juga memiliki tujuan dalam pemenuhan infrastruktur umum di kawasan pemukiman dasar. Kampung tematik bertujuan untuk mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata, meningkatkan kawasan hijau serta memperbaiki lingkungan dibidang sosial, meningkatkan peran partisipasi aktif masyarakat lokal, memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik, dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat kewilayahan.

Program Kampung Tematik didasari dengan landasan hukum berupa Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Kampung Tematik. Dalam kurun waktu dari tahun 2016 pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang hanya menjangkau beberapa wilayah saja. Namun, hingga tahun 2021 Kampung Tematik menjadi satu program andalan Pemkot Semarang untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Tercatat 260 wilayah yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Semarang telah melakukan program Kampung Tematik, data dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 2.6 Tabel Jumlah Kampung Tematik di Kota Semarang dari Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Data	32	80	65	32	26	15	10	260

Sumber: Kampung Tematik Kota Semarang, 2022

Awalnya, Kampung tematik diinisiasi pada tahun 2016 dengan jumlah 32 wilayah, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah sebesar 80 wilayah, pada tahun 2018 Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan jumlah wilayah kampung tematik pada 65 wilayah baru. Selanjutnya pada tahun 2019-2022, tren program yang menjadi program unggulan mengalami penurunan kampung tematik yang baru di wilayah-wilayah kelurahan di Kota Semarang.

Secara pasti berdasarkan tabel di atas pada tahun 2019, Pemkot Semarang hanya mengadakan 32 wilayah dengan kampung tematik baru, pada tahun 2020 karena kondisi *Covid-19* juga tidak dipungkiri turunnya kembali adanya kampung tematik baru pada poin 26. Pada tahun 2021, masih dengan kondisi *Covid-19* pengadaan kampung tematik pada poin 15 wilayah baru di Kota Semarang.

Lebih dalam lagi, tidak semua wilayah mampu mengemban program dan melaksanakan kampung tematik seperti yang diharapkan dalam kriteria Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Kampung Tematik. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan secara sederhana bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki perhatian wilayah-wilayah dengan kondisi lingkungan kumuh, perekonomian kurang maju, dan kepadatan penduduk yang jarang di Kota Semarang untuk melaksanakan implementasi kebijakan Kampung Tematik.